



Pemilik Tak Bisa Lagi Umbar Sapi

■ Pemda Upayakan Teknologi Baru TPST Piyungan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengupayakan sebuah teknologi mutakhir melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengatasi polemik Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang *overload*. Sebagai konsekuensi penerapan teknologi baru, warga yang selama ini memelihara sapi di TPST tak bisa lagi mengakses tumpukan sampah di lokasi.

Ketua Tim Pelaksana Harian Unit Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Prioritas (TP5) DIY, Rani Sjamsinarti menyebut setiap takaran sampah yang datang akan langsung diolah.

"Jadi, para pemilik sapi ini harus mulai anjang-ang ya, karena kami tak mungkin pakai *sanitary landfill* lagi. Negara-negara lain juga mulai meninggalkannya. Itu butuh lahan yang sangat luas," ungkapnya saat dijumpai di ruang kerjanya di Komplek Keparitahan, Yogyakarta, Selasa (11/2).

Ia pun optimistis KPBU mampu terealisasi. Penutupan *landfill* dan pengadaan lahan pengelolaan industri sampah pun bakal dilakukan tahun ini. "Karena

ke depan memang dibutuhkan teknologi baru yang bisa digunakan untuk pengelolaan sampah, yang sangat diharapkan juga ramah lingkungan," terangnya.

Dia juga memastikan, pihaknya menerapkan proses seleksi ketat terhadap para investor yang kini telah mengajukan tawaran mengelola TPST Piyungan. Terlebih, segalanya pun harus benar-benar didalamani, minimnya pemahaman teknologi selain *sanitary landfill*.

"Investor datang pasti memperlihatkan bagusnya. Jadi, kita yang harus cari terus. Yang pro lingkungan, tidak terlalu mahal, serta *tiping fee* yang mewajibkan kita untuk membayar tidak terlalu besar," katanya.

"Contohnya ada yang dari Korea itu, dapat mengolah limbah medis juga. Tapi, aturannya kan Pemda tidak boleh. Semua masih kita kaji, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun sosialnya ya," tambah Rani.

Adapun persiapan menuju penyerahan pengelolaan TPST kepada investor melalui KPBU, masih dibutuhkan dana Rp120 miliar, dalam beberapa tahap dari APBN dan APBD DIY. Untuk tahun 2020, dialokasikan Rp14 miliar dari

APBD dan Rp40 miliar dari APBN.

Ia menjelaskan, masa perencanaan KBPU telah mulai sejak 2018. Untuk saat ini, pihaknya tengah persiapan *feasibility study*, dengan tahap awal *market sounding*. Menurutnya, sesuai rencana, proses ini paling tidak terselesaikan kisaran bulan Mei mendatang.

"Kami kan harus mencari masukan dari pemain di sektor yang di-KPBU-kan ini. Apakah teknologi yang diajukan memenuhi dengan aturan lingkungan kita," tuturnya.

Tinggikan tanggul

Kepala Dinas PUPESDM DIY, Hananto Hadi Utomo mengatakan umur TPST Piyungan sudah habis sejak 2019 lalu. Menurutnya, yang dapat dilakukan DPUESDM saat ini hanya memperpanjang usia TPST Piyungan. Salah satu yang dilakukan adalah penataan infrastruktur, seperti tanggul dan dermaga.

"Yang bisa kita suport adalah memperpanjang usia TPST Piyungan sambil menunggu KPBU. Ya kita tinggikan tanggulnya. Lalu juga akan kita buat terasering, supaya memperpanjang umur TPST," katanya.

Jangan Ada Tipping Fee

DPRD DIY mendukung penuh progres KPBU yang tengah diupayakan Pemda DIY, untuk pengelolaan TPST Piyungan. Namun, kalangan legislatif berharap, agar perjanjian dengan investor nantinya tidak menerapkan sistem *tipping fee*.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta mengatakan, pemberian *tipping fee* pada pihak pengelola sejatinya adalah hal yang wajar, karena memang ada pa-yung hukum yang menaungi. Tapi, Pemda DIY diharap mampu menekan pengeluaran tersebut.

"Kalau dengan *tipping fee*, artinya Pemda harus bayar per tahun ya, besarnya tertentu, karena keuntungan investor sebagian juga dari *tipping fee*. Pemda harus bisa rendah-rendahan lah," katanya, Selasa (11/2).

Menurut Huda, beberapa daerah harus mengeluarkan *tipping fee* dalam jumlah fantastis untuk pengelolaan sampah ini, dimana besarnya mencapai puluhan,

hingga ratusan miliar per tahun. Oleh sebab itu, ia kurang setuju dengan sistem semacam ini.

"Ya, saya cenderung tidak sepakat dengan *tipping fee* ini. Kalau Pemda terbebani tahunan, jadi kurang masuk akal. APBD pun terkekang dengan metode ini. Selain itu, investor juga jadi kurang bebas," ucapnya.

Lebih lanjut, untuk saat ini, pihaknya berharap Pemda DIY bisa segera mendapatkan investor supaya polemik sampah bisa secepatnya terselesaikan. Namun, ia bisa memahami, kesulitan ini juga disebabkan oleh rumitnya pola birokrasi di pemerintah tingkat pusat.

"Seharusnya dimudahkan lah, di DIY ini sudah jalan KPBU sejak 2018, tapi baru bisa jalannya paling tidak 2022 nanti. Bayangkan, betapa sulitnya, lama sekali. Prosesnya yang wajar saja, jangan sulit-sulit ya," pungkas politisi PKS tersebut. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005